

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) selama sepuluh tahun ini tercatat paling menonjol dalam dinamika keuangan syariah di Indonesia. Berbagai LKMS tersebut lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* (BMT). Masing-masing BMT biasa memiliki nama, yang diperlihatkan pada papan nama dan identitas lainnya. Ada LKMS yang menyebut diri sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan yang secara lengkap menyatakan diri sebagai KJKS BMT dengan nama tertentu.

Bait al-Māl wa al-Tamwīl (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salām*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.¹

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak

¹ Nur Rianto Al-arif, *Lembaga Keuangan syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 317.

dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua, dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Adapun sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.²

Perkembangan ekonomi global, khususnya dalam perkembangan lembaga keuangan ditandai dengan beroperasinya BMT dengan prinsip syariah. tentunya membawa peluang dan risiko yang makin besar pula. Untuk itu setiap lembaga keuangan harus meningkatkan fungsi pengendalian intern serta pengelolaan risiko yang komprehensif. Dengan tujuan agar setiap risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian dapat dimanajemen dengan mitigasi risiko yang baik dan benar. Struktur tata kelola manajemen risiko yang kuat menjadi dasar evaluasi keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian untuk menghasilkan pendapatan yang bekesinambungan, mengurangi potensi kredit macet (*non performing loan*), mengurangi fluktuasi pendapatan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi,

²*Ibid.*, hlm. 318.

mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.³

Harus diakui bahwa tidak ada satu aktivitas apapun yang kita lakukan yang tidak mengandung resiko, namun hal ini tidak berarti bahwa dengan adanya resiko yang ditimbulkan dari setiap aktivitas menyebabkan kita tidak melakukan aktivitas apapun guna menghindari resiko yang akan timbul. Resiko merupakan bahaya, resiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian resiko juga harus dipandang sebagai peluang, yang dipandang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kata kuncinya adalah tujuan dan dampak pada sisi yang berlawanan. Dengan kata lain resiko adalah probabilitas bahwa baik atau buruk yang mungkin terjadi yang akan berdampak terhadap tujuan yang ingin kita capai. Untuk itu resiko perlu kita kelola dengan baik melalui proses yang logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta memonitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses atau yang biasa kita kenal dengan manajemen resiko.

Pada perkembangan BMT saat ini, walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan sebuah BMT senantiasa atau sering kali terganjal oleh sejumlah masalah klasik. Diantaranya :

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 255.

1. Lemahnya partisipasi anggota
2. Kurangnya permodalan
3. Pemanfaatan pelayanan
4. Lemahnya pengambilan keputusan
5. Lemahnya Pengawasan
6. Manajemen Resiko⁴

Masalah – masalah tersebut diatas merupakan potensi resiko yang yang tampak dan teridentifikasi, sehingga berangkat dari permasalahan umum tersebut sebuah BMT seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi resiko atas permasalahan tersebut diatas. Selanjutnya bagi sebuah BMT yang bergerak dalam usaha simpan pinjam baik KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) ataupun UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) merupakan industri jasa keuangan yang sarat dengan resiko. KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) ataupun UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) sebenarnya adalah miniatur dari perbankan. Yang dikelola hampir sama, yakni uang masyarakat (anggota koperasi) dan kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat (anggota koperasi / BMT dan dalam hal koperasi memiliki kapasitas berlebih maka koperasi dapat melayani Non Anggota) yang membutuhkan. Dengan resiko tersebut maka sudah selayaknya jika KJKS ataupun UJKS menerapkan konsep manajemen resiko, sebagai konsekuensi dari bisnis yang penuh dengan resiko. Artinya resiko yang mungkin timbul dimitigasi dengan cara menerapkan

⁴ *Ibid.*, hlm. 230.

manajemen resiko disemua lini dan bidang. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus dan pengelola KJKS / UJKS sudah selayaknya memiliki kemampuan dalam hal manajemen resiko atau sudah mengikuti program sertifikasi manajemen resiko. Tentunya konsep yang ditawarkan disesuaikan dengan tingkat resiko yang melekat pada bisnis koperasi.

Penerapan manajemen risiko ada tiga yaitu risiko kredit, risiko pasar, ataupun risiko operasional. Pada risiko operasional ini mengacu pada kegagalan dalam pengoperasian lembaga keuangan seperti BMT, mencakup bocornya sistem informasi, tata kelola yang buruk, risiko kerugian akibat tidak memadai atau gagalnya sistem dan proses internal, kelalaian pegawai dan peristiwa eksternal yang berdampak negatif ke lembaga keuangan. Risiko manajemen (umumnya karena manajemen terlalu bergantung pada beberapa individu, dan adanya kecurangan) juga dianggap sebagai komponen risiko operasional. Unsur-unsur risiko yang mencakup risiko operasional yaitu:

1. Proses Internal
2. Sumber daya manusia
3. System
4. *External evens*
5. *Legal dan regulatory requirements (legal risk)*⁵

⁵ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 33.

Risiko Operasional dihadapi oleh setiap lembaga keuangan begitu juga di BMT. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui faktor penyebab risiko operasional sehingga setiap lembaga keuangan dapat membuat rencana kerja untuk mengelola risiko tersebut. Kerugian yang timbul akibat Risiko operasional yang sudah diperkirakan akan dibebankan dalam *pricing asset*, sedangkan yang belum diperhitungkan (unexpected) harus di-cover dengan modal.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Disamping itu risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung dengan uang, seperti nama baik atau reputasi lembaga keuangan menjadi rusak. Dimana dampak kerugian non keuangan terkait dengan reputasi, pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian keuangan.

Berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, bencana alam, kebangkrutan karena tuntutan hukum, kerugian usaha karena kesalahan proses, kecurangan manusia, ketidakjelasan dan ketidakcukupan ketentuan kerja hanya merupakan sekedar contoh dari risiko yang melekat pada aktivitas yang dilakukan manusia sejak lama. Risiko-risiko ini merupakan risiko operasional.

Perkembangan pengelolaan BMT secara profesional. Faktanya saat ini tidak sedikit BMT yang melakukan praktik jauh dari nilai-nilai Syariah. Pelaporan keuangan BMT juga masih banyak yang merujuk pada standar akuntansi konvensional. Pembinaan BMT tidak dilakukan oleh BI, sebagaimana

yang terjadi pada Perbankan, dikarenakan termasuk dalam katagori Koperasi yang dinaungi oleh Departemen Koperasi yang kurang mendapat perhatian terutama dari aspek akuntabilitasnya. Legalitas BMT yang beroperasi masih banyak yang belum bahkan tanpa badan hukum yang jelas.

Contoh kasus riil dari *moral hazard* SDI yang terjadi baru-baru ini berkaitan dengan kegagalan opsional BMT, ialah sebagaimana dilansir dalam sebuah media masa pada akhir bulan Mey 2011 dengan tema Nasabah Gerudug BMT Jami' Insan Mulia (JIM), pasalnya mereka tidak bisa menarik uang yang ditabung atau didepositokan oleh nasabah, kemudian para nasabah menggerudug kantor BMT untuk minta kejelasan sekaligus menarik uang mereka namun hasilnya nihil. Kejadian tersebut langsung mendapat sorotan dari para pelaku BMT lainnya, khususnya yang berlokasi di Kabupaten Sleman.⁶

Contoh lain seperti yang sudah diketahui berita kejahatan internal perbankan (*internal fraud*) yang kerap menjadi headline surat kabar juga salah satu bentuk dari risiko operasional, seperti pencucian uang (*Money laundry*) yang dilakukan Melinda D, kemudian pengawasan internal yang lemah membuka peluang sangat besar bagi pelaku kejahatan perbankan merealisasikan tindakannya. Contoh, kasus pembobolan dana nasabah prioritas di suatu bank ternama sebesar Rp16,3 miliar, bisa dikatakan dipicu oleh lemahnya pengawasan internal. *Internal fraud* yang melibatkan pengelola yang telah puluhan tahun

⁶ Hendri Hermawan Adi Nugraha, "***Manajemen Operasional BMT (Studi di BMT Mitra Usaha Ummat)***", dalam <https://hendrihermawanadinugraha.wordpress.com>. Akses tanggal 26 Maret 2012.

bekerja di bank itu menunjukkan bahwa tidak ada jaminan lamanya bekerja menjadikan seseorang steril dari motif melakukan kejahatan. Jadi, premis bahwa rasa memiliki dan loyalitas akan menghilangkan motif melakukan *fraud* ternyata tidak terbukti. Kunci menghindari timbulnya *fraud* adalah ditutupnya rapat-rapat pintu kesempatan melakukan kejahatan internal.⁷

Di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur termasuk BMT yang terbilang berkembang dinilai dari jumlah nasabah yang semakin banyak, cabang-cabang yang sudah berdiri di gresik, serta lokasi yang strategis yang sebagian besar berdekatan dengan pasar tradisional. Dari perkembangan BMT tersebut pastilah setiap kantor dan cabang memiliki risiko yang semakin besar pula, manajemen operasional yang tidak lepas dari risiko-risiko dari faktor internal maupun eksternal, dimulai dari SDM, teknologi, anggaran belanja, semuanya pasti mengandung risiko, maka setiap kantor atau cabang pasti memiliki manajemen mitigasi risiko yang handal, di BMT Mandiri Sejahtera karangcangkring pengawasan risiko dipegang oleh bidang audit yang setiap hari mengawasi kantor dan cabang-cabang secara bergilir agar setiap kantor dan cabang-cabang terhindar dari kecurangan-kecurangan baik dari faktor internal maupun eksternal. maka dengan contoh kasus diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan mengangkat judul “PERAN MANAJEMEN MITIGASI RISIKO OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA KOPERASI BMT MANDIRI SEJAHTERA”.

⁷ Koran.bisnis.com, pentingnya mitigasi risiko operasional perbankan, di akses pada 20 April 2012.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah manajemen mitigasi risiko operasional di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera guna menghindari *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh faktor-faktor internal di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimanakah peran manajemen mitigasi risiko operasional Koperasi BMT Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan profitabilitas pada Koperasi BMT Mandiri Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran manajemen mitigasi risiko operasional di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera guna menghindari *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh faktor-faktor internal di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera.
2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen mitigasi risiko operasional Koperasi BMT Mandiri Sejahtera mampu meningkatkan profitabilitas pada Koperasi BMT Mandiri Sejahtera.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Peran Manajemen Mitigasi Risiko Operasional dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Koperasi BMT Mandiri Sejahtera.
- b. Bagi Pembaca, secara umum diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan atau informasi tentang Penerapan Manajemen Mitigasi Risiko Operasional dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Koperasi BMT Mandiri Sejahtera.
- c. Bagi Universitas, diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, sebagai referensi dalam ruang lingkup hasil karya penulisan lapangan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya bidang studi Ekonomi Syariah.
- d. Bagi Instansi (Koperasi BMT Mandiri Sejahtera) penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas Koperasi BMT Mandiri Sejahtera.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Manajemen Mitigasi Risiko Operasional dalam Meningkatkan Profitabilitas

pada Koperasi BMT Mandiri Sejahtera” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Meliputi : Manajemen Operasional BMT, Manajemen Risiko, Konsep Risiko, Macam-macam Risiko, Penerapan Manajemen Risiko Operasional, Hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan , Profitabilitas serta faktor- faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan profitabilitas.

BAB III : Metode Penelitian

BAB IV : Hasil Penelitian

Meliputi hasil penelitian mengenai latar belakang, Profil dan Gambaran Umum Koperasi BMT Mandiri Sejahtera serta hasil penelitian tentang Peran Manajemen Mitigasi Risiko Operasional dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Koperasi BMT Mandiri Sejahtera yang dilanjutkan dengan analisis.

BAB V : Penutup dan Kesimpulan

Meliputi kesimpulan dan saran-saran, yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.